

Overview I-Account APBN

Pendapatan

Rp5,4 T (344,1%)
▲ 34,5% (yoy)

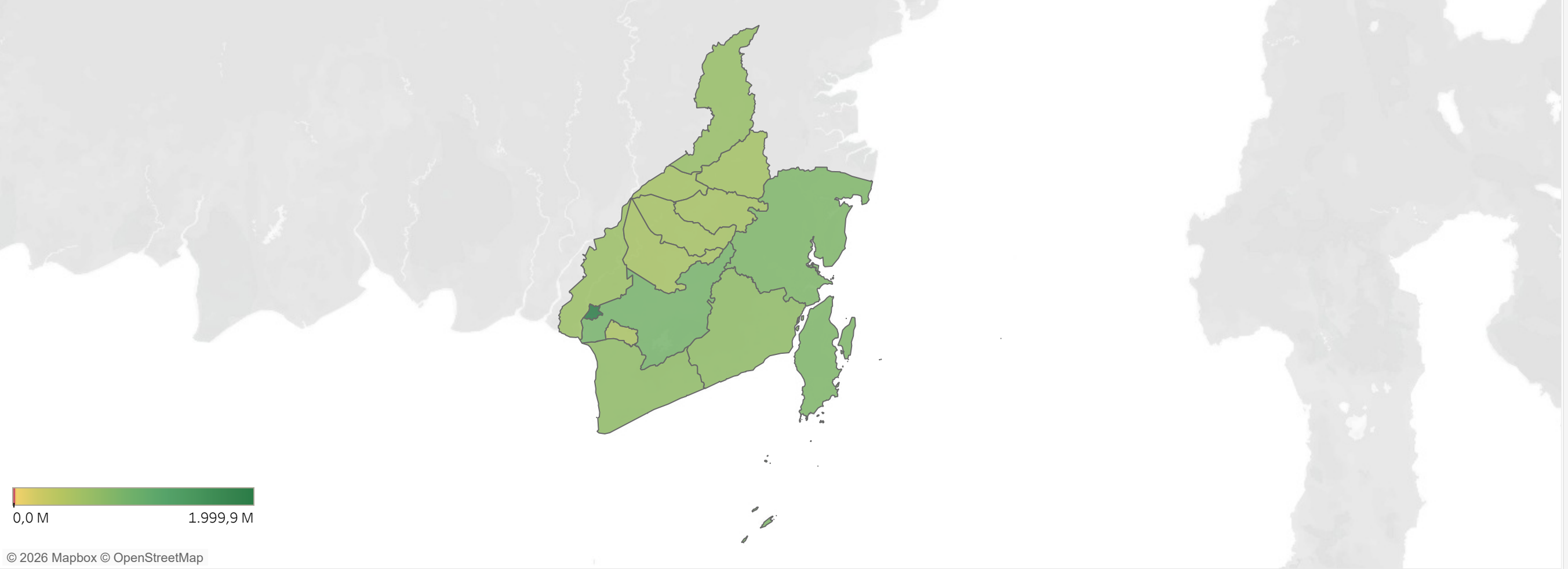
Belanja

Rp11,9 T (39,7%)
▼ -10,8% (yoy)

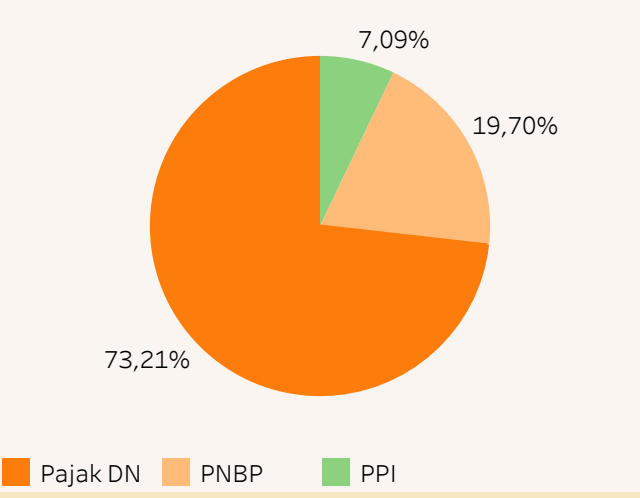
Defisit

Rp-6,6 T (23,0%)
▼ 30,0% (yoy)

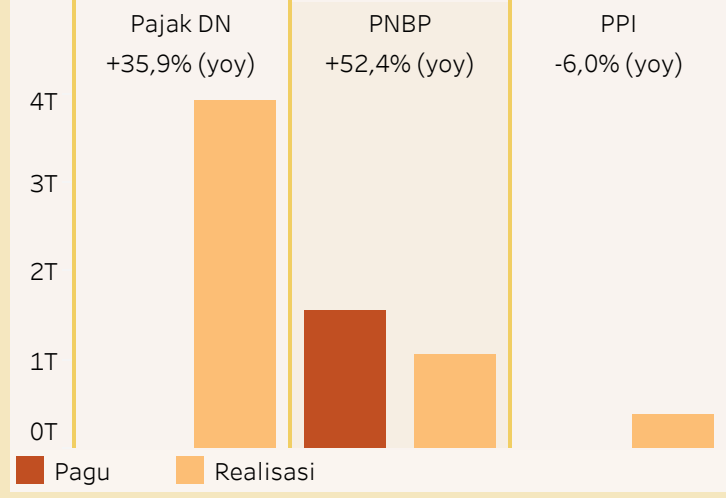
Peta Realisasi Belanja Negara per Wilayah



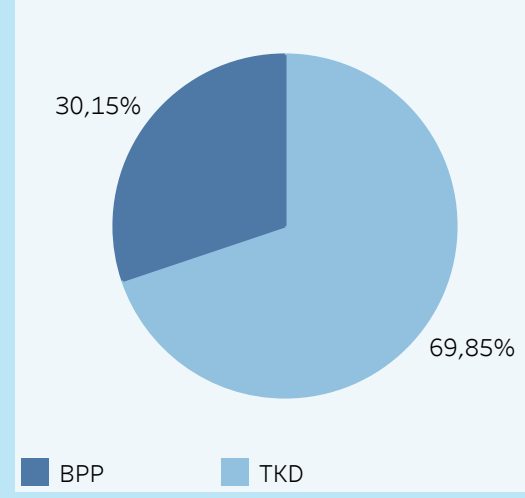
Persentase Komposisi Pendapatan



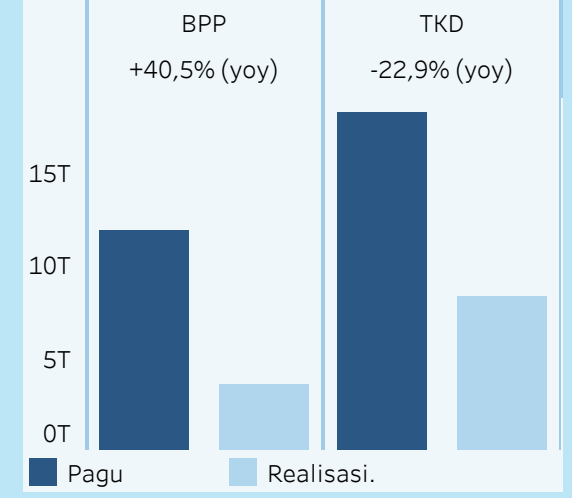
Realisasi per Jenis Pendapatan



Persentase Komposisi Belanja



Realisasi per Jenis Belanja



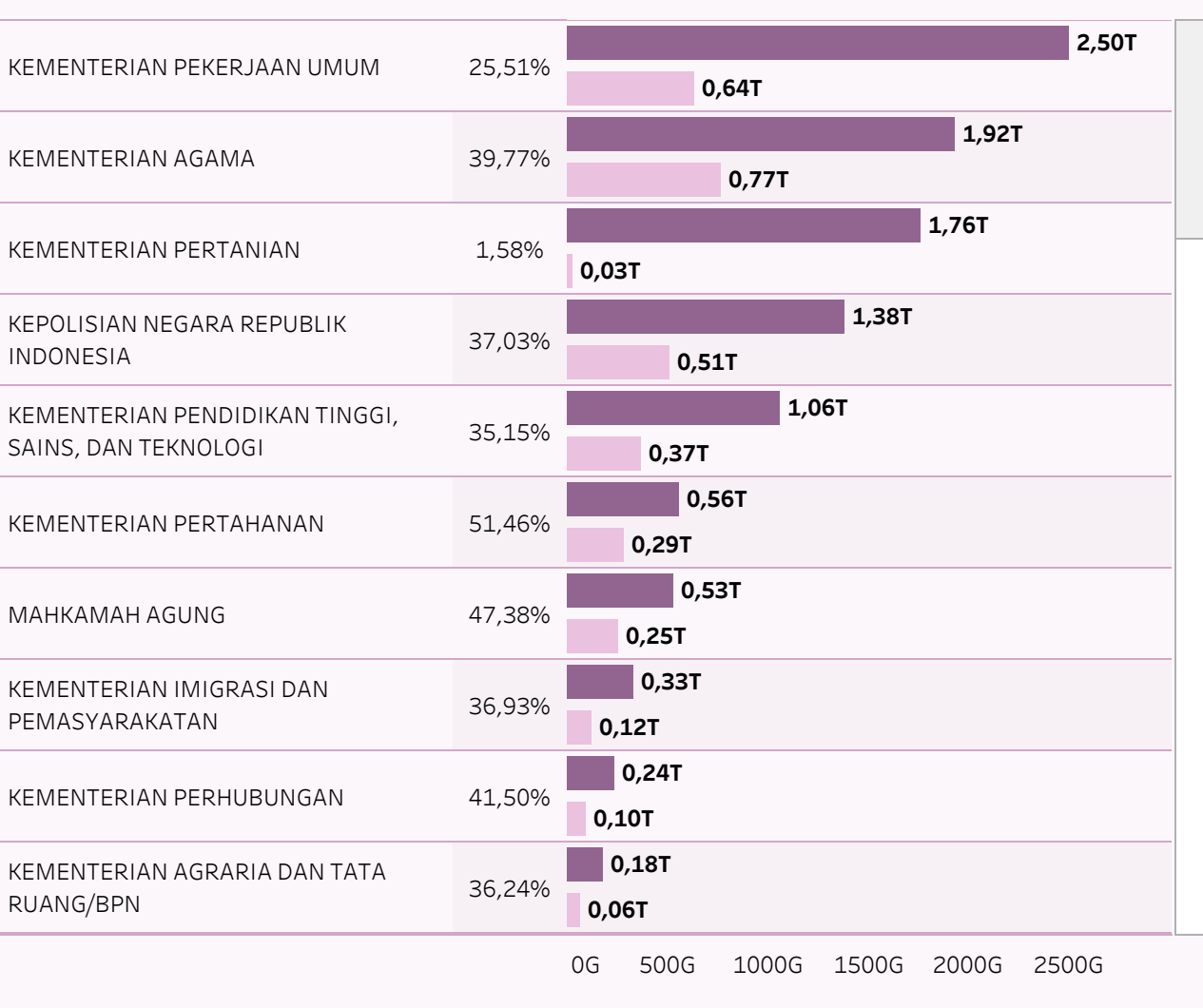
Pendapatan Regional

	Realisasi Y-1	Realisasi	% Growth
Provinsi Kalimantan Selatan	4,0T	5,4 T	▲ 34,52%
Grand Total	4,0T	5,4 T	▲ 34,52%

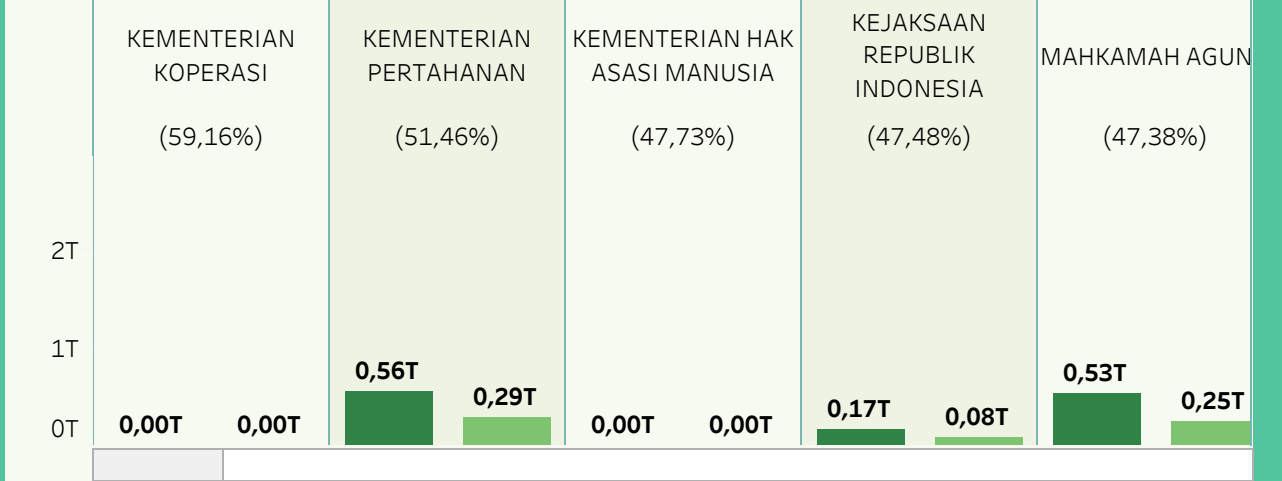
Belanja Regional

	Pagu Y-1	Realisasi Y-1	% thdp Pagu Y-1	Pagu	Realisasi	% thdp Pagu	% Growth
Provinsi Kalimantan Selatan	41,8T	13,4T	31,9%	30,0T	11,9 T	39,7%	▼ 10,75%
Grand Total	41,8T	13,4T	31,9%	30,0T	11,9 T	39,7%	▼ 10,75%

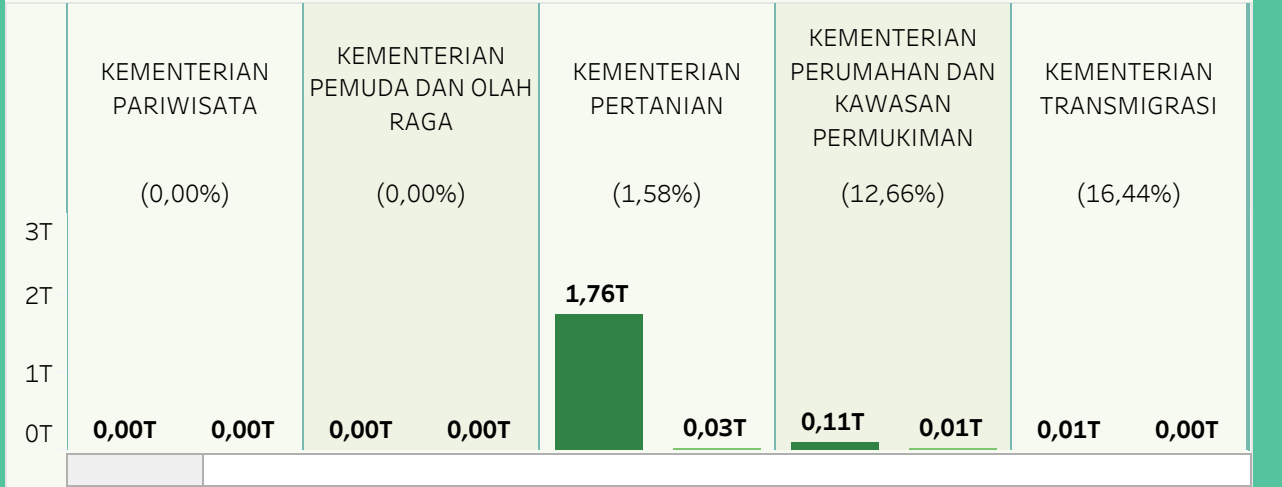
Kinerja 10 KL Pagu Tertinggi



5 KL Persentase Realisasi Tertinggi



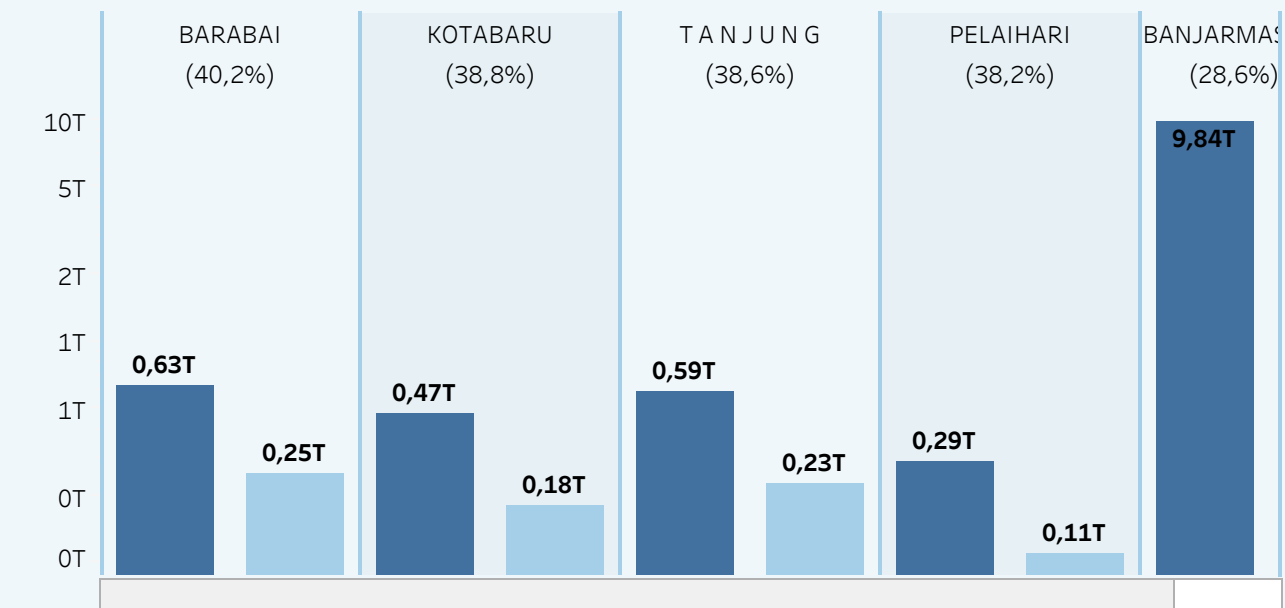
5 KL Persentase Realisasi Terendah



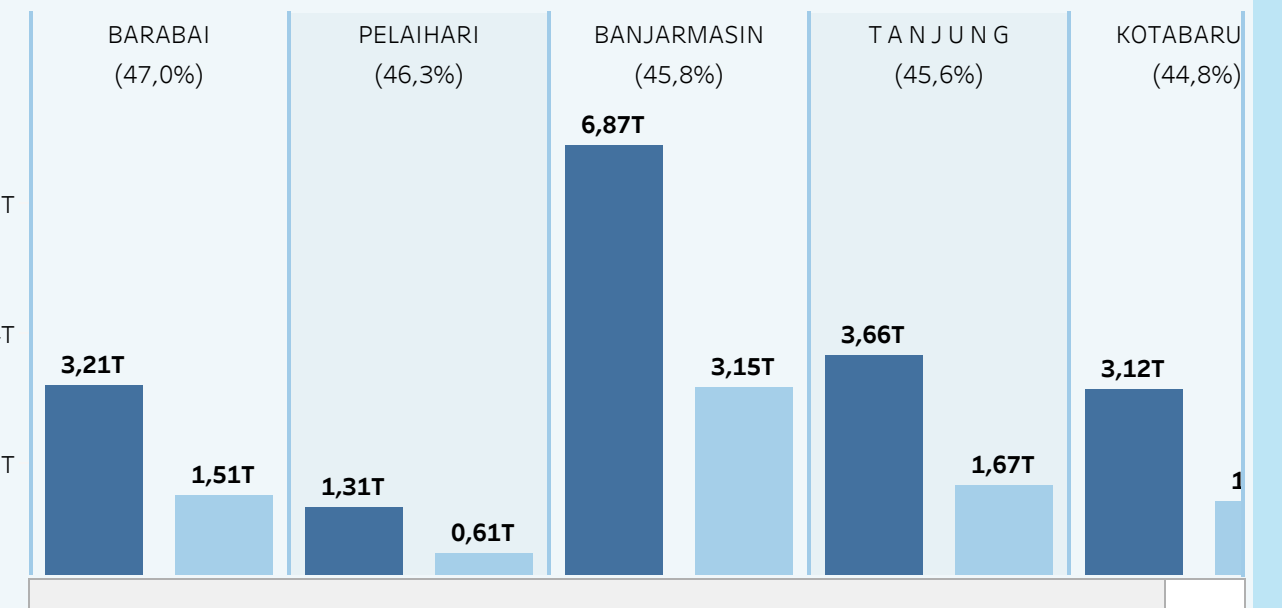
Kinerja Belanja KPPN



Kinerja BPP per KPPN



Kinerja TKD per KPPN



HASIL ANALISIS ISU FISKAL REGIONAL

Analisis Fiskal Regional

A | Perkembangan Pendapatan Negara s.d. 29 Mei 2026

Kinerja Pendapatan Negara sebesar Rp5,36 triliun (18,24%) dari target pendapatan negara sebesar Rp29,43 triliun. Realisasi tersebut tumbuh sebesar 34,52% yoy. Realisasi Pajak Dalam Negeri mencapai 22,91% (Rp3,93 triliun), Pajak Perdagangan Internasional mencapai 3,55% (Rp380,61 miliar), serta PNBP mencapai 67,80% (Rp1,06 triliun). Pendapatan negara didominasi oleh Pajak Dalam Negeri (73,21%).

B | Perkembangan Belanja Negara s.d. 29 Mei 2026

1. Kinerja Belanja Negara sebesar Rp11,92 triliun (39,73%) dari pagu Rp30 triliun, terkontraksi 10,75% yoy. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat mencapai 30,38% (Rp3,59 triliun) dari pagu Rp11,83 triliun, tumbuh 40,47% yoy dan Transfer ke Daerah mencapai 45,83% (Rp8,33 triliun) dari pagu Rp18,17 triliun, terkontraksi 22,89% yoy. Belanja Negara didominasi oleh Transfer ke Daerah (69,85%).

2. Kinerja Belanja 10 K/L Pagu Tertinggi, Kementerian PU merupakan K/L dengan pagu tertinggi yaitu Rp2,50 triliun, dengan realisasi mencapai 25,51% (Rp0,64 triliun). Kementerian Pertahanan menjadi K/L yang memiliki kinerja realisasi belanja tertinggi yaitu 51,46% (Rp0,29 triliun) dari pagu Rp0,56 triliun. Sementara, Kementerian Pertanian menjadi K/L yang memiliki kinerja realisasi belanja terendah dengan realisasi baru 1,58% (Rp0,03 triliun) dari pagu Rp1,76 triliun.

3. Kinerja Belanja 5 K/L Tertinggi dan Terendah, kinerja penyerapan tertinggi dicapai oleh Kementerian Koperasi dengan realisasi 59,16% (Rp2,52 miliar) dari pagu Rp4,26 miliar. Sementara, terdapat 2 K/L yang belum merealisasikan anggaran belanja s.d. 29 Mei 2026 yaitu Kementerian Pariwisata dan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

4. Kinerja KPPN, Kinerja penyerapan tertinggi dicapai oleh KPPN Barabai dengan realisasi sebesar 45,9% (Rp1,76 triliun) dari pagu Rp3,84 triliun. Sementara, kinerja penyerapan terendah berada di KPPN Banjarmasin dengan realisasi 35,7% (Rp5,97 triliun) dari pagu Rp16,72 triliun.

Isu dan Rekomendasi Fiskal Regional

A | Isu Pendapatan Negara, meliputi:

Isu *under invoicing* pada sektor pertambangan di Kalimantan Selatan menjadi perhatian serius karena berpotensi mengurangi penerimaan negara, khususnya dari pajak dan kewajiban terkait kepabeanan serta cukai yang melekat pada aktivitas ekspor komoditas tambang. Praktik pelaporan nilai transaksi

yang lebih rendah dari harga sebenarnya dapat menimbulkan selisih penerimaan serta mengganggu akurasi data ekspor, terutama pada komoditas unggulan di Kalimantan Selatan seperti batubara.

B | Rekomendasi Pendapatan Negara, diperlukan:

Pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan penegakan hukum secara terintegrasi untuk menekan praktik *under invoicing* pada sektor pertambangan. Optimalisasi sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak, Bea Cukai, pemerintah daerah, serta instansi terkait perlu diperkuat melalui pemanfaatan sistem digital dan pertukaran data ekspor secara real time agar nilai transaksi dapat terverifikasi dengan akurat. Selain itu, peningkatan kepatuhan pelaku usaha melalui audit berkala, transparansi pelaporan, serta penerapan sanksi yang tegas dan konsisten menjadi langkah penting untuk meminimalisasi potensi kebocoran penerimaan negara.

C | Isu Belanja Negara, meliputi:

Bidkeu Polda Kalimantan Selatan mendapatkan alokasi anggaran belanja barang dukungan operasional serta dana direktif Kapolda yang dialokasikan untuk kegiatan kontinjensi seperti Aman Nusa I (konflik sosial), Aman Nusa II (bencana alam), dan Aman Nusa III (penanganan terorisme). Total anggaran yang tersedia tidak sepenuhnya dapat direalisasikan sesuai Rencana Penarikan Dana (RPD) awal karena pelaksanaannya sangat bergantung pada instruksi Mabes Polri serta kebutuhan mendesak dari satuan kerja di tingkat Polres. Kondisi ini menyebabkan adanya penyesuaian dan pergeseran penarikan anggaran sepanjang tahun berjalan.

D | Rekomendasi Belanja Negara, diperlukan:

Bidkeu Polda Kalimantan Selatan disarankan untuk mengajukan dispensasi penyesuaian perhitungan dan data IKPA melalui KPPN agar komponen penyerapan anggaran dan deviasi halaman III DIPA mendapatkan relaksasi perhitungan IKPA.

HASIL ANALISIS TEMATIK REGIONAL

Analisis Tematik Regional

Dua peluang investasi di Kalsel di atas diperkirakan memiliki total nilai investasi Rp5.722.322.687.295.

Progres tindak lanjut peluang investasi hingga Triwulan I 2026:

1. Smelter Slab Billet Steel Kab. Tanah Bumbu

Telah memasuki tahap penjajakan lanjutan dengan investor, termasuk promosi proyek melalui portal nasional dan forum investasi strategis. Pemprov Kalimantan Selatan bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk sinkronisasi perizinan industri dan pertanahan, serta mendorong kesiapan infrastruktur pendukung di kawasan industri. Upaya percepatan ini ditujukan untuk mendukung hilirisasi mineral dan peningkatan nilai tambah di sektor logam dasar.

2.SPAM Regional Banua Enam Bendungan Tapin

Masih terus ditindaklanjuti melalui penyusunan dokumen IPRO dan studi kelayakan teknis. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama pemerintah kabupaten/kota terkait telah membentuk tim koordinasi lintas wilayah, menjajaki skema KPBU, serta melakukan promosi kepada investor potensial. Selain itu, percepatan perizinan dan penyiapan lahan untuk jaringan distribusi menjadi fokus utama dalam mendukung kesiapan implementasi proyek strategis ini.

3. Pengelolaan Limbah Medis (B3) Banjarbaru

Telah mencakup finalisasi dokumen IPRO insinerator, identifikasi lokasi di kawasan TPA Provinsi, serta promosi aktif kepada calon investor melalui forum investasi daerah dan platform digital. Pemerintah juga mendorong percepatan izin lingkungan dan kerja sama antardaerah dalam penyediaan pasokan limbah medis, guna memastikan keberlanjutan operasional dan skala keekonomian proyek.

4. Pergudangan, Pusat Distribusi Banjarmasin

Menunjukkan perkembangan positif melalui penyelesaian dokumen IPRO, pemetaan lokasi potensial di Kelurahan Basirih, serta promosi aktif kepada calon investor. Pemprov Kalimantan Selatan juga telah berkoordinasi dengan pemerintah kota untuk penyesuaian tata ruang, serta mendorong percepatan perizinan dan penyediaan infrastruktur dasar guna memperkuat kesiapan proyek secara teknis dan administratif. Saat ini tanah masih milik masyarakat sehingga pembebasan lahan maupun pengurusan akan diserahkan kepada investor, sementara perkiraan pembiayaan dan rencana insentif fiskal juga belum disusun sehingga sepenuhnya akan dihitung oleh investor.

Isu dan Rekomendasi Tematik Regional

A | Isu Peluang Investasi Daerah

1. Smelter Slab Billet Steel Kab. Tanah Bumbu

Belum optimalnya kesiapan infrastruktur dasar seperti pelabuhan, jalan industri, dan jaringan listrik berkapasitas tinggi. Selain itu, proses sinkronisasi perizinan kawasan industri dan AMDAL masih berjalan lambat, ditambah dengan tantangan dalam menjamin keberlanjutan pasokan bahan baku bijih besi dan kesiapan tenaga kerja lokal yang masih terbatas. Ketidakpastian tata ruang serta koordinasi lintas lembaga juga menjadi faktor penghambat dalam percepatan realisasi investasi industri hilir logam tersebut.

2. SPAM Regional Banua Enam Bendungan Tapin

Masih menghadapi berbagai kendala, seperti belum selesainya sinkronisasi perencanaan lintas kabupaten/kota, keterbatasan kesiapan jaringan distribusi dan sistem transmisi antarwilayah, serta kebutuhan pembiayaan besar yang memerlukan skema pendanaan kreatif seperti KPBU. Selain itu, koordinasi antarinstansi terkait dan kepastian ketersediaan lahan untuk infrastruktur pendukung juga menjadi tantangan utama dalam mendorong percepatan realisasi proyek penyediaan air baku regional ini.

3. Pengelolaan Limbah Medis (B3) Banjarbaru

Keterbatasan fasilitas pengolahan limbah yang terstandar, rendahnya kesadaran fasilitas kesehatan dalam pemilahan limbah, serta belum optimalnya regulasi dan pengawasan terhadap pengelolaan limbah B3 medis. Selain itu, tingginya biaya transportasi limbah ke luar daerah dan keterbatasan lahan untuk pembangunan insinerator turut menjadi hambatan, di tengah kebutuhan mendesak akan sistem pengelolaan limbah medis yang aman, efisien, dan ramah lingkungan. Masih menunggu follow up dari Dit. SMI.

4. Pergudangan, Pusat Distribusi Banjarmasin

Belum sinkronnya lokasi proyek dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota, keterbatasan lahan siap bangun, serta belum optimalnya infrastruktur akses dan drainase di kawasan potensial. Selain itu, rendahnya keterampilan tenaga kerja lokal serta perlunya kepastian regulasi dan insentif investasi turut menjadi tantangan dalam menarik minat investor dan mempercepat realisasi proyek logistik strategis ini. Untuk tanah saat ini masih milik masyarakat, jadi untuk pembebasan lahan nanti diserahkan ke investor. Termasuk untuk pengurusan lahan jika diperlukan. Untuk perkiraan pembiayaan memang belum disusun, jadi akan diserahkan keseluruhan ke investor untuk penghitungan. Termasuk untuk Rencana insentif fiskal juga belum ada.

B | Rekomendasi Peluang Investasi Daerah

1. Rekomendasi Smelter Slab Billet Steel Kab. Tanah Bumbu

- Pemerintah daerah bersama Kementerian Investasi mulai memfasilitasi pra-negosiasi antara calon investor strategis dengan pemilik aset untuk mempercepat proses akuisisi. Selain itu, disusun feasibility study terbaru yang memuat analisis keekonomian dan potensi rantai pasok baja di Kalimantan, guna meningkatkan kredibilitas proyek di mata investor. Upaya koordinasi juga diperkuat dengan kementerian teknis terkait (ESDM, Perindustrian, dan BUMN) untuk merancang skema insentif khusus bagi sektor hilirisasi logam, termasuk dukungan fiskal, jaminan pasokan energi, dan insentif ekspor. Pemerintah daerah mulai menyiapkan pelatihan vokasi untuk tenaga

kerja lokal sebagai bagian dari persiapan operasionalisasi ulang smelter.

- DPMPTSP sedang gencar untuk mencari investor baru. Telah disampaikan dalam Laporan APID 2025 ke Direktorat SMI pada tanggal 24 Oktober 2025 melalui Nota Dinas Nomor: 810/WPB.19/2025

2. Rekomendasi SPAM Regional Banua Enam Bendungan Tapin

- Pemerintah provinsi mempercepat proses pembebasan lahan melalui fasilitasi lintas sektor.
- Disiapkan skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha) untuk pengembangan lanjutan, dengan dukungan dokumen perencanaan teknis dan studi kelayakan dari Bappeda.
- Pelibatan swasta dalam pengelolaan SPAM melalui sistem konsorsium PDAM regional mulai dijajaki.
- Penyiapan pelatihan manajemen air minum dan teknis operasional bagi SDM lokal untuk mendukung keberlanjutan operasional pasca-investasi.
- Kanwil akan mendampingi dalam proses KPBU bersama dengan PT SMI

3. Rekomendasi Pengelolaan Limbah Medis (B3) Banjarbaru

Pemerintah daerah perlu segera mendorong pembangunan insinerator medis terpusat melalui skema investasi dengan insentif fiskal dan perizinan berbasis risiko, menetapkan regulasi pengelolaan limbah B3 yang lebih tegas, serta mendorong kolaborasi antar daerah dalam penyediaan lahan dan operasional. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM dan kesadaran publik melalui pelatihan dan sosialisasi harus diintegrasikan dengan sistem monitoring dan evaluasi terpadu agar pengelolaan limbah berjalan efektif, aman, dan berkelanjutan. Laporan APID terkait Limbah B3 telah disampaikan ke Dit. SMI tahun 2023

4. Rekomendasi Pergudangan, Pusat Distribusi Banjarmasin

- Mendorong penyesuaian tata ruang untuk mendukung pengembangan kawasan pergudangan di Basirih, mempercepat proses perizinan melalui OSS berbasis risiko, serta memfasilitasi penyediaan infrastruktur dasar seperti akses jalan, drainase, dan utilitas pendukung.
- Peningkatan SDM dilakukan melalui program pelatihan vokasional berbasis kebutuhan industri logistik, disertai dengan promosi investasi secara aktif melalui forum bisnis dan platform digital.
- Kebijakan insentif fiskal dan kemitraan dengan lembaga pendidikan juga dikembangkan guna memperkuat ekosistem logistik yang berdaya saing dan berkelanjutan.

HASIL ANALISIS MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG)

Analisis MBG

Jumlah SPPG meningkat dari 300 menjadi 301, jumlah supplier meningkat dari 1.337 menjadi 1.346, dan penerima manfaat meningkat dari 702.468 penerima menjadi 704.761 penerima.

Isu dan Rekomendasi MBG

A | Isu MBG, meliputi:

Dalam penggunaan akses rekening virtual (*Virtual Account/VA*), SPPG saat ini hanya diberikan kewenangan untuk melakukan monitoring saldo dana, namun belum memiliki akses untuk memantau maupun mencetak daftar mutasi transaksi yang terjadi pada rekening VA tersebut. Kondisi ini menyebabkan keterbatasan dalam proses pengawasan, pencatatan, rekonsiliasi, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan, karena SPPG tidak dapat melakukan verifikasi secara rinci terhadap arus masuk dan keluar dana yang terjadi melalui rekening VA yang dimiliki.

B | Rekomendasi MBG, diperlukan:

BGN agar memberikan akses terbatas (*view only*) terhadap rekening *Virtual Account (VA)* kepada SPPG untuk melihat dan mencetak mutasi transaksi tanpa kewenangan melakukan transaksi finansial maupun perubahan data rekening, guna mendukung proses pelaporan keuangan secara lebih akuntabel dengan tetap menjaga prinsip pembatasan kewenangan dan keamanan pengelolaan dana.

HASIL ANALISIS FLPP

Analisis FLPP

Jumlah unit yang dibangun meningkat dari 3.104 menjadi 3.343 unit, realisasi FLPP meningkat dari 2.425 unit menjadi 2.616 unit, jumlah lokasi realisasi FLPP meningkat dari 411 lokasi menjadi 426 lokasi, jumlah Kab./Kota yang ada program FLPP 13 Kab./Kota, dan jumlah nominal FLPP meningkat semula sebesar Rp318.721.917.750,- menjadi Rp343.867.850.250,-.

Isu dan Rekomendasi FLPP

A | Isu FLPP, meliputi:

Alokasi APBD sektor perumahan tahun 2026 mengalami penurunan, namun demikian Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk menyukseskan Program Tiga Juta Rumah melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat, percepatan pengusulan program perumahan, serta kolaborasi lintas sektor untuk memperluas akses hunian layak bagi masyarakat. Fokus program diarahkan pada penanganan kawasan kumuh, pembangunan rumah susun, perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), hingga penyediaan hunian bagi ASN di Banjarbaru. Pemprov. Kalsel tetap optimistis target program dapat tercapai melalui dukungan bantuan pusat, optimalisasi FLPP, pemanfaatan dana desa, serta penguatan validasi data.

B | Rekomendasi FLPP, diperlukan:

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan perlu memperkuat strategi kolaboratif dan inovatif tidak hanya dengan pemerintah pusat tetapi juga dengan pemerintah kabupaten/kota, perbankan, pengembang. Selain itu, penguatan validasi dan integrasi data perumahan menjadi langkah penting untuk memastikan intervensi program benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan, khususnya dalam penanganan kawasan kumuh, RTLH, dan penyediaan hunian bagi ASN. Pemprov Kalsel juga perlu mendorong inovasi pembiayaan dan pengawasan program secara berkelanjutan agar target penyediaan hunian layak, terjangkau, dan berkualitas tetap dapat tercapai secara optimal.



RCE WEEKLY REPORT
KANWIL DJPB PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Program Prioritas dan Peluang Investasi Daerah
Minggu ke-20



HASIL ANALISIS GIANT SEA WALL

Analisis Giant Sea Wall

Di Kalimantan Selatan tidak terdapat program prioritas *Giant Sea Wall*.

Isu dan Rekomendasi Giant Sea Wall

Di Kalimantan Selatan tidak terdapat program prioritas *Giant Sea Wall*.

HASIL ANALISIS KOPERASI DESA MERAH PUTIH

Analisis Koperasi Desa Merah Putih

Jumlah Koperasi sebanyak 2013

Koperasi telah memiliki akun sebanyak 2013

Koperasi telah memiliki NIB sebanyak 1.629

Koperasi telah memiliki NPWP sebanyak 2013

Koperasi telah RAT 2025 meningkat semula 1.565 menjadi 1.566

Simpanan pokok sebesar Rp1.711.566.110,-

Simpanan wajib sebesar Rp302.309.000,-

Volume transaksi tahun 2026 sebanyak 5.995

Nilai transaksi tahun 2026 sebesar Rp88.447.800,-

Isu dan Rekomendasi Koperasi Desa Merah Putih

A | Isu Koperasi Desa Merah Putih, meliputi:

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mempercepat pembangunan 2.013 Koperasi Merah Putih. Hingga saat ini, sebanyak 45 gerai telah selesai dibangun dan disiapkan untuk beroperasi. Percepatan program tersebut dilakukan melalui kolaborasi pemerintah daerah, perangkat desa, dan berbagai pemangku kepentingan, disertai penguatan manajemen koperasi serta digitalisasi layanan.

B | Rekomendasi Koperasi Desa Merah Putih, diperlukan:

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan perlu memastikan percepatan pembangunan 2.013 Koperasi Merah Putih tidak hanya berfokus pada penyelesaian fisik gerai, tetapi juga pada kesiapan operasional, kualitas sumber daya manusia, dan keberlanjutan usaha koperasi. Penguatan pendampingan manajemen, transparansi tata kelola, serta integrasi digitalisasi layanan perlu dioptimalkan agar koperasi mampu bersaing dan memberikan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat.

HASIL ANALISIS SEKOLAH RAKYAT

Analisis Sekolah Rakyat

Target jumlah sekolah rakyat sebanyak 3 SR

Realisasi jumlah SR sd Saat ini yang sudah berjalan per jenjang sebanyak 13 Unit :

1. PAUD = 0 Unit
2. SD = 2 Unit
3. SMP = 6
4. SMA = 5

Isu dan Rekomendasi Sekolah Rakyat

A | Isu Sekolah Rakyat, meliputi:

Puluhan pekerja proyek pembangunan Sekolah Rakyat (SR) Banjarbaru, Kalimantan Selatan, melakukan aksi mogok kerja sebagai bentuk protes atas keterlambatan pembayaran gaji oleh pihak kontraktor.

B | Rekomendasi Sekolah Rakyat, diperlukan:

Pihak kontraktor agar segera menyelesaikan pembayaran upah pekerja yang tertunda melalui percepatan pencairan termin atau penyesuaian *cash flow* proyek, disertai penguatan koordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pengawas pekerjaan guna memastikan progres fisik tetap berjalan sesuai target.



RCE WEEKLY REPORT
KANWIL DJPB PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Program Prioritas dan Peluang Investasi Daerah
Minggu ke-20



HASIL ANALISIS REVITALISASI SEKOLAH

Analisis Revitalisasi Sekolah

Target pelaksanaan Revitalisasi Sekolah TA 2026 sebanyak 39 Sekolah/Madrasah, yang sedang berjalan oleh Satker Kementerian Pekerjaan Umum sebanyak 29 Madrasah, dan jumlah seekolah yang sudah PKS melalui Ditjen PDM meningkat dari 9 sekolah menjadi 10 sekolah.

Isu dan Rekomendasi Revitalisasi Sekolah

A | Isu Revitalisasi Sekolah, meliputi:

Terdapat taman kanak-kanak (TK) yang telah ditetapkan sebagai penerima program revitalisasi sekolah dan telah melaksanakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan kementerian terkait sebagai dasar pelaksanaan program tersebut.

B | Rekomendasi Revitalisasi Sekolah, diperlukan:

Perlu dilakukan percepatan penetapan dan PKS antara satuan pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA dengan Kementerian terkait untuk akselerasi program revitalisasi sekolah.

HASIL ANALISIS SMA UNGGUL GARUDA

Analisis SMA Unggul Garuda

Target Jumlah Sekolah Garuda

1. Sekolah Garuda Transformasi sebanyak 1
2. Sekolah Garuda Baru masih belum ada *update*

Realisasi Jumlah Sekolah Garuda s.d. saat yang sudah berjalan (unit)

1. Sekolah Garuda Transformasi sebanyak 1 (SMAN Banua Kalsel)
2. Sekolah Garuda Baru masih belum ada *update*

Isu dan Rekomendasi SMA Unggul Garuda

A | Isu SMA Unggul Garuda meliputi:

Penerimaan murid baru Tahun Ajaran 2026/2027 pada Program Sekolah Unggul Garuda di Kalimantan Selatan menjadi perhatian karena tingginya antusiasme pelajar berprestasi untuk masuk ke SMAN Banua Kalsel sebagai sekolah transformasi unggulan berbasis asrama dan penguatan sains-teknologi.

B | Rekomendasi SMA Unggul Garuda, diperlukan:

Diperlukan sistem seleksi yang transparan, objektif, dan inklusif agar dapat menjangkau siswa terbaik dari seluruh wilayah Kalimantan Selatan, termasuk daerah terpencil dan keluarga kurang mampu. pemerintah juga perlu mengantisipasi berbagai tantangan seperti keterbatasan daya tampung, pemerataan akses pendidikan unggul, peningkatan kualitas fasilitas asrama, serta penguatan kompetensi dan kesiapan tenaga pendidik.

HASIL ANALISIS KETAHANAN PANGAN

Analisis Ketahanan Pangan

Produksi Gabah Tahun 2026 sampai dengan saat ini mencapai 322.714,15 Ton. Alokasi dana program ketahanan pangan sebesar Rp1,96 triliun dan sudah terealisasi sebesar Rp69,28 miliar (3,54%).

Isu dan Rekomendasi Ketahanan Pangan

A | Isu Ketahanan Pangan meliputi:

Pemerintah Kota Banjarbaru mulai memperkuat ketahanan pangan keluarga melalui pemanfaatan halaman rumah warga dengan gerakan penanaman cabai dan terong. Program bertajuk "Kartini Hebat Banjarbaru, Ketahanan Pangan Tanam Cabe dan Terong di Halaman Rumah" ini bertujuan membantu masyarakat menekan pengeluaran rumah tangga, meningkatkan kemandirian pangan keluarga, serta mendukung pengendalian inflasi daerah melalui pemanfaatan lahan pekarangan secara produktif.

B | Rekomendasi Ketahanan Pangan, diperlukan:

Pemerintah Kota Banjarbaru perlu memperkuat pendampingan kepada masyarakat melalui penyediaan bibit, pelatihan budidaya sederhana, serta monitoring berkala agar pemanfaatan pekarangan rumah dapat berjalan optimal, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata terhadap ketahanan pangan keluarga serta pengendalian inflasi daerah.

HASIL ANALISIS KETAHANAN ENERGI

Analisis Ketahanan Energi

Belum ada perubahan/tetap dibandingkan periode sebelumnya. Pemerintah Kab. HST sedang mengusulkan untuk pembangunan Bendungan Pancur Hanau senilai Rp30 miliar. Bendungan ini merupakan infrastruktur vital yang tidak hanya berfungsi sebagai penyedia air baku, irigasi, dan pengendali banjir, tetapi juga berperan penting dalam penyediaan energi.

Isu dan Rekomendasi Ketahanan Energi

A | Isu Ketahanan Energi, meliputi:

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) terus mendorong penguatan ketahanan energi melalui pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) dengan menginstruksikan para sekretaris kecamatan se-Kabupaten Hulu Sungai Tengah agar menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam implementasi program di tingkat wilayah

B | Rekomendasi Ketahanan Energi, diperlukan:

Perlunya sinergi antara pemerintah daerah, kecamatan, hingga masyarakat dalam mengembangkan potensi energi terbarukan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST)